

**LAPORAN AKUNTABILITAS  
KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN  
TAHUN ANGGARAN 2022**

**KECAMATAN MALILI**

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan Syukur serta Alhamdulillah atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa kami ucapkan, sehingga penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) Kecamatan Malili dapat kami selesaikan.

Terselenggaranya good governance merupakan prasyarat bagi setiap instansi pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat sesuai peraturan yang berlaku. Hal yang paling utama dalam penyusunan LAKIP ini merupakan suatu bentuk pertanggung jawaban dari tugas pokok, fungsi dan kewenangan yang telah menjadi tanggung jawab Kecamatan Malili sebagai sarana umpan balik untuk selalu melakukan perbaikan dalam perencanaan dan penyelenggaraan kegiatan.

Kami sangat menyadari dalam penyusunan LAKIP ini masih terdapat banyak kekurangan baik dalam penyampaian isi materi maupun teknik penulisannya, oleh karena itu kami tidak menutup diri untuk menerima perbaikan, kritik dan saran yang membangun dari semua pihak guna penyempurnaannya. Akhirnya kami berharap semoga LAKIP Kecamatan Malili Tahun 2022 ini dapat berguna bagi semua pihak dan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk perbaikan dimasa yang akan datang.

Malili,      Februari 2023

CAMAT MALILI

**NASIR, SP.,M.Si**

NIP. 19850807 201001 1015

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

---

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) disusun berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan pelaksanaan lebih lanjut diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan akuntabilitas Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran.

Untuk mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang baik, Kecamatan Malili selaku Satuan Kerja Perangkat Daerah dituntut untuk meningkatkan kinerja. Peningkatan kinerja diharapkan mampu menghadirkan pemerintahan yang baik, bersih dan akuntabel. Adapun tujuan pelaporan kinerja adalah Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target yang diharapkan dengan realisasi yang terjadi. Pengukuran dan perbandingan kinerja dalam laporan kinerja menggambarkan posisi kinerja instansi pemerintah.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Luwu Timur, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup pemerintahan kabupaten, provinsi dan pusat.

Untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Tentu harapan tersebut perlu pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimasi sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil, bersih dan dapat dipertanggungjawabkan serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan akuntabel di Kecamatan Malili diperlukan penerapan *good governance*. Dimana terselenggaranya *good governance* merupakan persyaratan utama dalam mewujudkan pemerintahan yang aspiratif, mengutamakan kepentingan rakyat banyak dan berkeadilan.

Sebagai media pertanggungjawaban keberhasilan dan kegagalan melaksanakan misi organisasi, Kecamatan Malili menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2022 dalam upaya mewujudkan *good governance* yang dicita-citakan yang mempunyai pilar-pilar transparansi, partisipasi dan akuntabilitas.

### **1.1 Kondisi Geografis**

Luas wilayah Kecamatan Malili 830,379 km<sup>2</sup> atau sekitar 3,31 persen dari total luas wilayah Kabupaten Luwu Timur. Kecamatan Malili terdiri dari 14 (Empatbelas) Desa definitif dan 1 (satu) Kelurahan, dengan 52 dusun/lingkungan dan 139 RT. Adapun Desa/Kelurahan dimaksud masing-masing :

1. Kelurahan Malili
2. Desa Baruga
3. Desa Balantang
4. Desa Wewangriu
5. Desa Laskap
6. Desa Pongkeru
7. Desa Harapan
8. Desa Pasi-pasi
9. Desa Puncak Indah
10. Desa Ussu
11. Desa Atue
12. Desa Manurung
13. Desa Tarabbi
14. Lakawali
15. Lakawali Pantai

Jumlah Penduduk Kecamatan Malili pada tahun 2021 sebanyak 42.308 jiwa (Laporan Penduduk Per Desember 2021) dengan rincian : laki-laki sebanyak 21.874 jiwa dan perempuan sebanyak 20.434 jiwa dengan jumlah Kepala Keluarga sebanyak 11.276 KK. Penduduk Kecamatan Malili merupakan penduduk yang heterogen baik Suku maupun Agama. Adapun Suku dan Agama di Kecamatan Malili yaitu Suku Jawa, Bali, Lombok, Batak, Bugis, Toraja, Pamona dan Agama Islam, Kristen dan Hindu.

## **1.2 Data Umum Organisasi**

Secara keseluruhan keadaan dan jumlah Aparatur di Kantor Kecamatan Malili dan Kantor Kelurahan Malili per tanggal 31 Desember 2022 adalah 25 (dua puluh lima) orang PNS dan 23 (dua puluh tiga) orang Non PNS dengan rincian sebagai berikut :

1. Berdasarkan Golongan

Tabel 1.1  
Jumlah ASN Berdasarkan Golongan

NO.	GOLONGAN	RUANG				JUMLAH
		A	B	C	D	
1	Golongan IV	1	-	-	-	1
2	Golongan III	4	6	3	2	11
3	Golongan II	-	-	3		3
4	Golongan I	-	-	-	-	-
<b>JUMLAH</b>		<b>5</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>25</b>

Sumber : Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian

2. Berdasarkan Pendidikan

Tabel 1.2  
Jumlah ASN Berdasarkan Pendidikan

NO.	GOLONGAN	JENJANG PENDIDIKAN				JUMLAH
		S2	S1/D4	D2/D3	SMA/SMP	
1	Golongan IV	1		-	-	1
2	Golongan III	-	10	1	-	12
3	Golongan II	-	-	-	3	13
4	Golongan I	-	-	-	-	-
<b>JUMLAH</b>		<b>1</b>	<b>10</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>25</b>

Sumber : Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian

### 3. Berdasarkan Jabatan

**Tabel 1.3**  
**Jumlah ASN Berdasarkan Jabatan**

NO.	JABATAN	ESELON				JUMLAH
		II.B	III.A/B	IV.A/B	NON ESELON	
1	Struktural	-	17	1	7	25
2	Fungsional	-	-	-	-	-
3	Fungsional Umum	-	-	-	-	-
<b>JUMLAH</b>		-	17	1	7	25

Sumber : Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian

### 4. Berdasarkan Status Kepegawaian

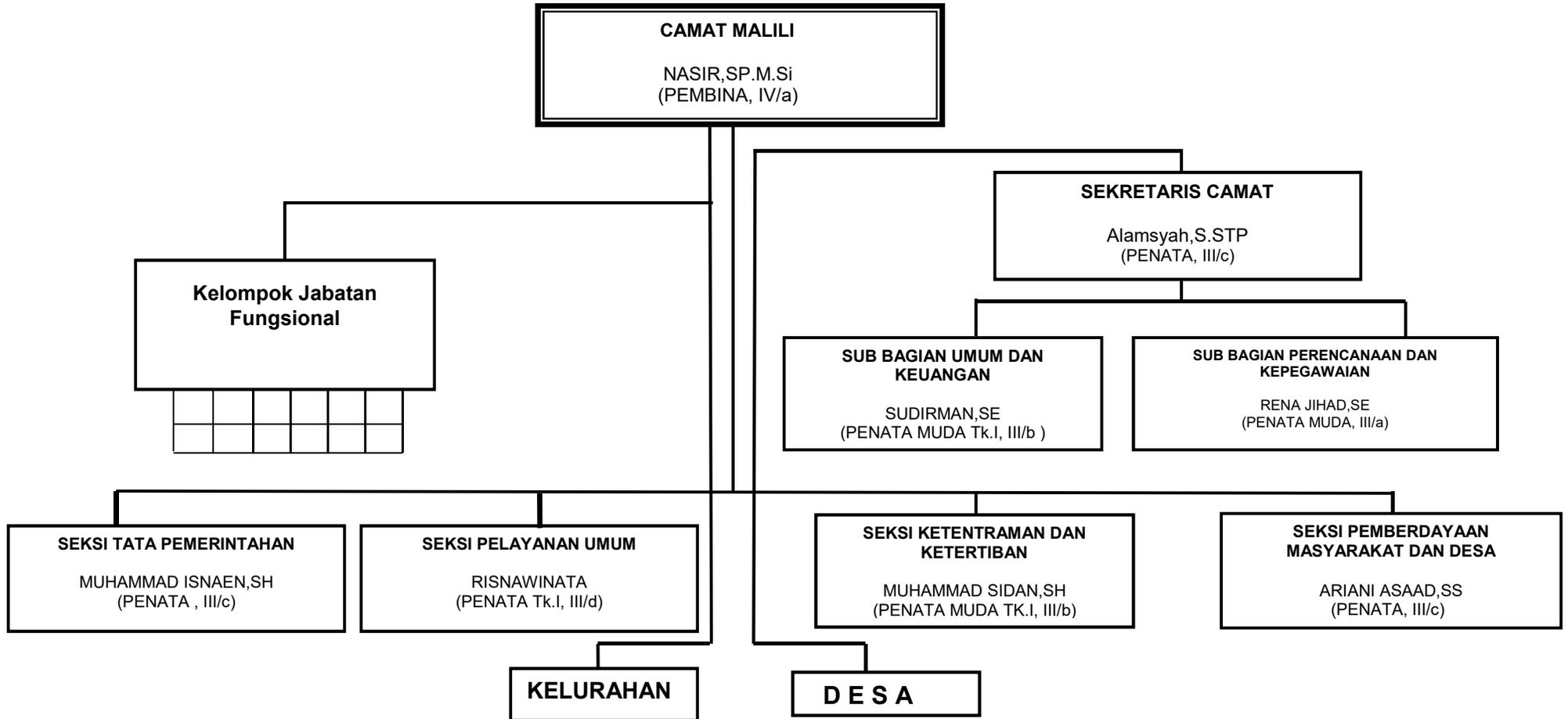
**Tabel 1.4**  
**Jumlah ASN Berdasarkan Status Kepegawaian**

NO.	STATUS KEPEGAWAIN	JUMLAH
1	PNS	25
2	CPNS	-
3	PTT	-
4	UPAH JASA	23
<b>JUMLAH</b>		<b>48</b>

Sumber : Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian

### 1.3. Struktur/Kondisi Organisasi

#### STRUKTUR ORGANISASI KANTOR KECAMATAN MALILI



#### **1.4. Peran Organisasi**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 08 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur dan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Luwu Timur. Organisasi Kecamatan merupakan satuan kerja perangkat daerah yang mempunyai peran sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan di wilayah kecamatan yang menjadi kewenangan daerah. Satuan kerja perangkat daerah kecamatan dipimpin oleh Camat yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

#### **1.5. Isu Strategis**

Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan Pemerintah Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur dituntut lebih transparan, kreatif dan inovatif dalam menghadapi perubahan-perubahan. Perencanaan pembangunan hendaknya selalu memperhatikan isu-isu dan permasalahan yang mungkin dihadapi ke depan oleh masyarakat sehingga arah pelaksanaan pembangunan lebih tepat sasaran. Untuk itu diantisipasi dengan perencanaan yang matang dan komprehensif sehingga arah pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah. Adapun isu-isu yang akan dihadapi Kecamatan Malili tidak terlepas dari permasalahan dan isu pembangunan Kabupaten Luwu Timur antara lain :

1. Tuntutan masyarakat untuk memberikan pelayanan yang prima
2. Adanya tuntutan akuntabilitas tata kelola pemerintahan

Isu strategis tersebut memerlukan penanganan secara komprehensif sebagaimana disebutkan dalam Renstra Kecamatan Malili yang mencakup strategi kebijakan program dan kegiatan. Implikasi terhadap pelayanan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur sebagai berikut :

1. Membangun sistem pelayanan prima yang cepat, tepat, efisien dan transparan
2. Membangun komitmen seluruh aparatur dalam melaksanakan tupoksi (tugas pokok dan fungsi) untuk mewujudkan akuntabilitas
3. Menetapkan kebijakan yang efektif untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat

Memperhatikan isu-isu yang dipermasalahkan diatas terkait pelayanan kepada masyarakat, diharapkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan mampu mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik.

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

---

#### **2.1. Rencana Strategis Tahun 2021-2026**

Renstra SKPD adalah suatu dokumen Perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan sehubungan dengan tugas dan fungsi SKPD dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis, yang akan menjadi acuan dalam penilaian kinerja SKPD oleh lembaga auditor baik internal ataupun eksternal. Rencana Strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Proses ini menghasilkan suatu Rencana Strategis yang setidaknya memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan Indikator Kinerja Program, Strategi Pembangunan, Kebijakan, Program dan Sasaran serta ukuran keberhasilan dalam pelaksanaannya. Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, penyusunan Rencana Strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar dalam 5 tahun ke depan mampu menjawab tuntutan lingkungan stratejik lokal, nasional dan global, namun berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Melalui pendekatan Rencana Strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah dapat lebih menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya meningkatkan kinerjanya. Rencana Strategis Kecamatan Malili Tahun 2021-2026 ditetapkan dengan maksud memberikan arah sekaligus menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan baik bagi pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha di dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah yang

berkesinambungan. Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dimaksudkan untuk :

1. Menyediakan dokumen perencanaan untuk 5 (lima) tahun mendatang (2021-2026), yang selanjutnya akan menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT).
2. Menyediakan pedoman dan landasan dalam menjalankan Tugas Pokok dan Fungsi perangkat kecamatan dan kelurahan secara terfokus dan berdasarkan prioritas kebutuhan.
3. Menyediakan instrumen yang dapat digunakan oleh pimpinan untuk mengarahkan pegawai dan mengalokasikan sumber daya secara optimal dalam pencapaian tujuan organisasi.
4. Menyediakan instrumen awal untuk pengukuran pencapaian kinerja yang akan digunakan oleh pemangku kepentingan dalam rangka menilai kinerja Kecamatan Malili.

Adapun tujuan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) adalah untuk :

1. Menciptakan keterpaduan langkah bagi seluruh unit kerja yang ada dalam melaksanakan tugas serta kegiatan yang telah disepakati.
2. Meningkatkan efektivitas tercapainya tujuan dan sasaran organisasi melalui kesungguhan dalam mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.

#### ❖ **Visi dan Misi**

Pada dasarnya, rencana Strategis (Renstra) OPD harus berpedoman pada Visi dan Misi Kabupaten Luwu Timur, agar pencapaian tujuan dalam pembangunan daerah terdapat sinkronisasi. Berkaitan dengan hal tersebut, maka Visi dan Misi Kecamatan Malili sesuai dengan RPJMD Kabupaten Luwu Timur. Adapun Visi dan Misi Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026 adalah :

***“Luwu Timur Berkelanjutan dan Lebih Maju Berlandaskan  
Nilai Agama dan Budaya”***

Sebagai penjabaran visi Pemerintah Kabupaten Luwu Timur diatas disusunlah misi yaitu rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi. Misi disusun dalam rangka mengimplementasikan langkah-langkah yang ingin dicapai dalam pembangunan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016–2021 dengan rincian sebagai berikut :

1. Meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat secara menyeluruh;
2. Mengembangkan ekonomi daerah yang berdaya saing dan berjangkauan luas;
3. Menyediakan infrastruktur daerah yang memadai dan lingkungan yang berkualitas;
4. Menciptakan pemerintahan dan pelayanan public yang lebih baik;
5. Mewujudkan ketentraman dan ketertiban bagi seluruh warga masyarakat;
6. Menjamin keberlangsungan pembangunan yang berbasis pada agama dan budaya.

**2.2. Perencanaan Kinerja Tahun 2022**

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan Rencana Kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis dan akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Dalam Rencana Kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran maupun kegiatan. Penyusunan Rencana Kinerja merupakan pedoman bagi penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Kecamatan

Malili telah menyusun Rencana Kinerja Tahun 2022 meliputi penetapan sasaran yang akan dilaksanakan berikut indikatornya, program dan kegiatan disertai indikator kinerja kegiatan. Kemudian selanjutnya Kecamatan Malili menyusun Perjanjian Kinerja, Perjanjian kinerja sebagai tekad dan janji dari perencanaan kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh Pimpinan Instansi dilingkup pemerintahan. Penyusunan Perencanaan Kinerja mengacu pada Dokumen Renstra Kecamatan Malili Tahun 2021-2026. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2022, Dokumen Renja Tahun 2022 dan DPA Tahun Anggaran 2022. Kecamatan Malili telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dengan uraian sebagai berikut :

**Tabel 2.1**  
**Perjanjian Kinerja Tahun 2022**

<b>NO</b>	<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>
<b>1.</b>	<b>Meningkatnya Kemampuan Pelayanan Publik Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan Malili</b>	<b>Survei Kepuasan Masyarakat</b>	<b>92,27</b>
<b>2.</b>	<b>Meningkatnya Capaian Kinerja dan Keuangan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan Malili</b>	<b>Nilai LAKIP</b>	<b>63</b>

Sumber : Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian

**Tabel 2.2**  
**APBD Perubahan Tahun 2022**

<b>SASARAN</b>	<b>PROGRAM DAN KEGIATAN</b>	<b>TARGET</b>	<b>PAGU</b>
<b>Meningkatnya Kemampuan Pelayanan Publik Penyelenggaraan Urusan pemerintahan Kecamatan</b>	<b>Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik</b>	<b>100%</b>	<b>6,349,940</b>
	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada dikecamatan</b>	<b>100%</b>	<b>37,146,740</b>
	<b>Peningkatan efektifitas pelayanan kepada masyarakat diwilayah kecamatan</b>	<b>100%</b>	37,146,740
	<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>	<b>100%</b>	<b>30,769,800</b>
	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain	100 lembar	30,769,800
	<b>Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan</b>	<b>100%</b>	<b>74,905,000</b>
	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	<b>100%</b>	<b>24,999,680</b>
	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa	95%	24,999,680
	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	<b>100%</b>	<b>74,905,000</b>
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Kegiatan	74,905,000

<b>Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>100%</b>	<b>4,025,000</b>
<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>100%</b>	<b>4,025,000</b>
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	100%	2,450,000
Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	12 Kegiatan	1,575,000
Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	100%	4,999,791
Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12 Kali	4,999,791
<b>Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum</b>	<b>100%</b>	<b>1,660,000</b>
<b>Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah</b>	<b>100%</b>	<b>1,660,000</b>
Pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan	100%	1,660,000
<b>Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>100%</b>	<b>3,160,000</b>
<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>100%</b>	<b>3,160,000</b>

	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Perdesaan dan Kecamatan di Wilayah Kawasan	15 Desa / Kelurahan	3,160,000
<b>Meningkatnya Capaian kinerja dan keuangan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan Malili</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>4,017,602,908</b>
	<b>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>26,907,460</b>
	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	3 Dokumen	13,522,000
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	4,999,880
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2 Dokumen	4,999,800
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10 Dokumen	3,385,780
	<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>2,122,683,116</b>
	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	24 Orang	2,089,938,426
	Koordinasi dan Penyusunan laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	12 Laporan	32,744,690
	<b>Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>19,349,920</b>
	Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	2 Dokumen	<b>19,349,920</b>
	<b>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>39,33,289</b>

Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4 Laporan	12,383,289
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	4 Orang	7,650,000
<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>170,825,400</b>
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	15 Jenis	7,054,300
Penyediaan Peralatan Rumah tangga	3 Jenis	41,200,000
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	15 Jenis	63,618,100
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	8 Jenis	9,133,600
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	8 Jenis	9,900,000
Fasilitasi Kunjungan Tamu	3540 Orang	12,145,500
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	350 Kali	101,292,500
<b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>291,500,000</b>
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2 Unit	<b>291,500,000</b>
<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>12,600,000</b>
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	850 Surat	19,245,223
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	36 Rek	12,600,000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	37 Org	330,300,000
<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan</b>	<b>100%</b>	<b>46,300,000</b>

<b>Pemerintahan Daerah</b>		
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	4 Unit	5,800,000
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	17 Unit	8,000,000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	5 Unit	32,500,000
<b>JUMLAH</b>	<b>100%</b>	<b>4,258,936,598</b>

Sumber : Bagian Perencanaan dan Kepegawaian

### BAB III

#### AKUNTABILITAS KINERJA

---

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan pemerintahan yang telah diperjanjikan sebelumnya, maka sebagai wujud tanggungjawab Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menyusun Laporan Kinerja Tahun 2022 secara sistematis untuk menyajikan keberhasilan, hambatan serta permasalahan yang dihadapi dalam mencapai Sasaran Staregis.

Dalam melakukan evaluasi keberhasilan atau kegagalan capaian kinerja setiap sasaran, maka digunakan skala pengukuran 5 (lima) kriteria sebagai berikut :

**Tabel III-1**

**Skala Nilai Peringkat Kinerja**

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	91 % ≤	Sangat Tinggi
2	76 % s.d 90 %	Tinggi
3	66 % s.d 75 %	Sedang
4	51 % s.d 65 %	Rendah
5	50 %	Sangat Rendah

**Sumber Data: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017**

### 3.1. Capaian IKU Tahun 2022

Pengukuran capaian kinerja yaitu mengukur tingkat capaian kinerja kegiatan yang dimulai dengan menetapkan indikator kinerja kegiatan berdasarkan kelompok input, proses, output, outcome, benefit dan impact, menentukan satuan setiap kelompok indikator, menetapkan rencana tingkat capaian (target), mengetahui realisasi indikator kinerja kegiatan, menghitung rencana dan realisasi untuk mendapatkan persentasenya. Pencapaian terhadap IKU Kantor Kecamatan Malili akan digambarkan per Sasaran Strategis, sebagai berikut:

**Sasaran 1. Meningkatnya Kemampuan Pelayanan Publik Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan Malili**

Sasaran strategis ini merupakan salah satu upaya mencapai misi ke-4 sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2021-2026 yaitu "**Menciptakan Kepemerintahan dan Pelayanan Publik yang lebih baik**", dan tujuan "**Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik**". Sasaran ini didukung oleh Kantor Kecamatan Malili sebagai leading sector pelaksanaan pelayanan public di tingkat kecamatan.

#### 1. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

Tabel 3.1

Perbandingan Antara Target dan Realisasi Tahun ini

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian (%)	Predikat
1	Meningkatnya Kemampuan Pelayanan Publik Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan Malili	Indeks Kepuasan Masyarakat	92.27	93.26	101.07%	Sangat Tinggi

Sumber :Seksi Pelayanan Umum

$$\text{Rumus : \% Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

**a. Analisis Capaian kinerja sasaran pertama sebagai berikut:**

Berdasarkan tabel diatas, maka dapat dilihat persentase capaian mencapai 101,07% dari target yang direncanakan. Ini berarti hasil yang dicapai sudah baik. Hasil survei Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap pelayanan perizinan maupun non perizinan Tahun 2022 Kecamatan Malili berdasarkan 9 (sembilan) pertanyaan sesuai peraturan Menpan dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik.

Untuk mendapatkan capaian kinerja pada indikator survei kepuasan masyarakat (SKM) dengan menggunakan kuesioner yang mengajukan permohonan pelayanan yang dibagikan pada setiap pengunjung yang datang pada loket pelayanan Kecamatan Malili, termasuk juga kuesioner indikator responden yang puas terhadap pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, menunjukkan realisasi baik dari target 92.27 atau melampaui target dengan nilai survei 93.25 (daftar terlampir). Sasaran pertama yaitu meningkatkan kinerja pelayanan publik di Kecamatan Malili.

Dalam meningkatkan kualitas pelayanan, diprioritaskan pada unsur yang mempunyai nilai terendah sedangkan unsur yang mempunyai nilai cukup tinggi harus tetap dipertahankan. Berdasarkan hasil tersebut maka diambil kesimpulan :

1) Nilai dalam kelompok paling rendah yang harus ditingkatkan adalah unsur kualitas sarana dan prasarana dengan nilai **767**.

❖ **Faktor penghambat** kenapa kecamatan Malili pada unsur kualitas sarana dan prasarana disebabkan karena kurang tersedianya sarana dan prasarana yang memadai serta berkualitas.

❖ **Solusi** untuk permasalahan unsur kualitas sarana dan prasarana adalah dengan meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana yang baik dan layak agar tercipta kepuasan masyarakat yang lebih baik

2) Nilai kelompok yang paling tinggi yang harus dipertahankan pada unsur kewajaran biaya/tariff dalam pelayanan dengan nilai **860**.

❖ **Faktor pendukung** kenapa Kecamatan Malili pada unsur kewajaran biaya/tariff dalam pelayanan mendapat nilai tinggi, disebabkan karena memang pelayanan di kantor kecamatan malili tekhusus pelayanan kependudukan tidak dipungut biaya apapun (gratis).

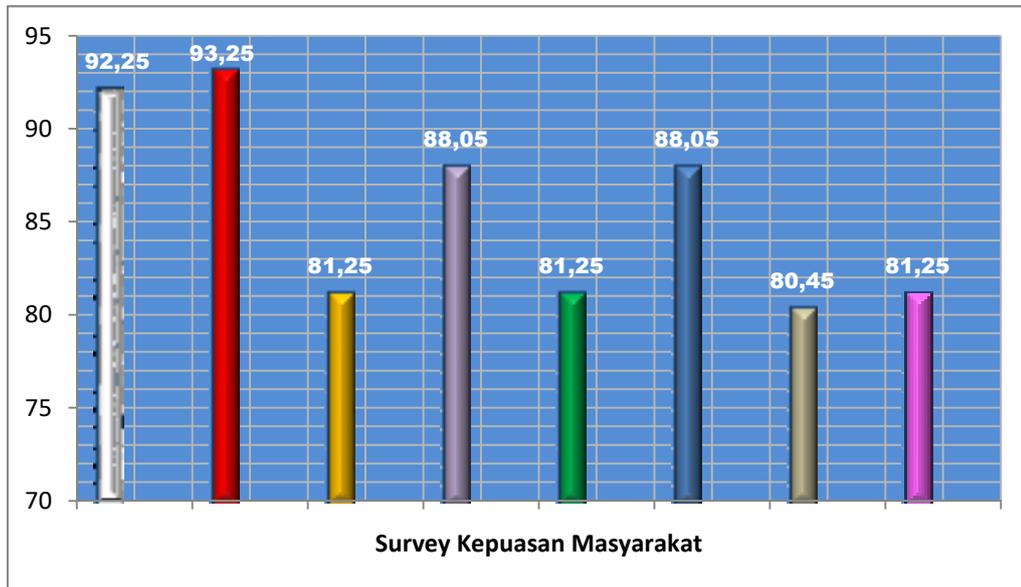
## 2. Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Beberapa Tahun Terakhir

Adapun perbandingan antara target dan realisasi dengan tahun-tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 3.2**  
**Perbandingan Target dan Realisasi dengan Tahun-Tahun Sebelumnya**

NO	Indikator Kinerja	Tahun	Target	Realisasi	Predikat
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	2019	80.45	81.25	Tinggi
2		2020	81.25	88.05	Tinggi
3		2021	81.25	88.05	Tinggi
4		2022	92.27	93.26	Tinggi

Sumber : Seksi Pelayanan Umum



Keterangan Grafik :

Target 2019	Realisasi 2019
Target 2020	Realisasi 2020
Target 2021	Realisasi 2021
Target 2022	Realisasi 2022

Berdasarkan grafik diatas, maka dapat dilihat perbandingan capaian kinerja tahun 2019, tahun 2020 dengan tahun 2021 dan tahun 2022. Pada setiap tahunnya realisasi Survei Kepuasan Masyarakat mengalami peningkatan dan melampaui target yang telah ditentukan.

### 3. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2022 dengan Target yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

**Tabel 3.3**  
**Perbandingan Capaian Kinerja Sampai Dengan 2022 Terhadap Target Renstra**

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	RENSTRA
			2022	2022	
1	Meningkatnya Kemampuan Pelayanan Publik Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan Malili	Indeks Kepuasan Masyarakat	92.27	93.26	92.27

**Sumber : Seksi Pelayanan Umum**

Dengan melihat table capaian diatas, Indeks Kepuasan Masyarakat yang terealisasi hingga tahun 2022 sebesar 93,26 atau setara dengan 101,07% dengan Predikat Sangat Tinggi, Target nilai IKM pada akhir periode Resntra 2021-2026 yaitu 94.5, jika Realisasi Tahun 2022 dibandingkan dengan target IKM akhir periode Renstra, maka persentase capaian IKM sampai dengan tahun 2022 adalah 99%. Target ditahun 2022 memiliki peluang yang besar untuk dapat tercapai. Terkait indikator tersebut, diharapkan Kantor Kecamatan Malili untuk lebih meningkatkan segala aspek yang mendukung terwujudnya indikator tersebut seperti ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas, sarana dan prasarana serta sumber anggaran, sehingga nantinya sasaran yang akan dicapai yaitu meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kecamatan Malili dapat terwujud.

#### **4. Analisis Penyebab Keberhasilan dan Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan**

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja diatas dilakukan analisis pencapaian kinerja guna memberikan gambaran atau informasi yang transparan mengenai sebab peningkatan atau penurunan kinerja yang telah dilakukan.

Adapun hal yang mempengaruhi peningkatan kinerja yaitu sikap petugas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Adapun beberapa hal yang mempengaruhi kinerja pelayanan kepada masyarakat yaitu :

- a. Keterbatasan SDM
- b. Sarana dan Prasarana yang kurang memadai

#### **5. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Keterbatasan sumber daya sarana dan sumber daya manusia dalam menyampaikan informasi tentang syarat dan ketentuan dalam pelayanan perizinan dan non perizinan di Kecamatan Malili dapat terfasilitasi dengan adanya papan informasi, brosur dan banner yang ditempatkan ruang pelayanan di kecamatan dan desa/kelurahan sehingga dengan sendirinya masyarakat dapat langsung melihat informasi terkait syarat dan ketentuan pengurusan pelayanan perizinan dan non perizinan.

#### **6. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja**

Adapun program dan kegiatan yang mendukung sasaran ini yaitu:

**A. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik :**

1) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat

a. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan

Pada tahun 2022 untuk kegiatan perizinan pelaksanaannya tidak lagi di Kecamatan, namun untuk pelayanan umum lainnya masih tetap difasilitasi di kecamatan seperti surat ahli waris, keterangan pindah penduduk serta pengantar pembuatan KTP

❖ **Hambatan :**

a) Masih kurangnya tenaga SDM dan sarana dan prasana yang memadai.

❖ **Solusi :**

a) Perlu dilakukan pelatihan dalam rangka peningkatan SDM

**B. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**

1) Koordianasi kegiatan pemberdayaan Desa

a. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa

Target pada sub kegiatan ini adalah persentase keterwakilan perempuan dalam pelaksanaan musrembang mencapai 90%. Musrenbang Kecamatan Malili dilaksanakan pada Bulan Februari 2022, masing-masing Desa/Kelurahan mengusulkan sebanyak 5 kegiatan prioritas dengan total 150 usulan. Setelah dilakukan musyawarah dan verifikasi oleh BAPPEDA, usulan yang terealisasi pada tahun 2023 sebanyak 30 kegiatan prioritas.

❖ **Hambatan :**

- a) Masih kurangnya partisipasi perempuan dalam kegiatan musrenbang serta menyampaikan usulan dalam musrenbang.

❖ **Solusi :**

- a) Memberikan pemahaman kepada tokoh perempuan terkait pelaksanaan musrenbang.
- b. Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan

Target dalam sub kegiatan ini adalah terlaksananya kegiatan PKK pada 14 Desa dan 1 Kelurahan di Kecamatan Malili. Kegiatan PKK untuk tingkat Kecamatan yaitu :

- a) Memfasilitasi administrasi PKK Desa/Kelurahan;
- b) Memfasilitasi Program / Kegiatan PKK Desa/Kelurahan;
- c) Pendampingan kegiatan pemberdayaan yang dibina oleh PKK Desa/Kelurahan.

Sepanjang tahun 2022 PKK kecamatan Malili melakukan beberapa kegiatan diantaranya Lomba Kampung Organik, Lomba Dasawisma dan Lomba Posyandu terintegrasi. Kegiatan PKK pada tahun 2022 sebagian besar berkaitan dengan penertiban administrasi PKK Desa/Kelurahan dan beberapa perlombaan baik ditingkat kecamatan maupun di tingkat Kabupaten.

❖ **Hambatan :**

- a) Sumber Daya Manusia terbatas.

❖ **Solusi :**

- a) Melakukan bimbingan teknis bagi pengurus PKK untuk peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia.

## 2) Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan

### a. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

Target dalam sub kegiatan ini adalah terlaksananya kegiatan kelurahan yang memberdayakan masyarakat yang dilaksanakan di kelurahan malili pada tahun 2022 yaitu peningkatan kegiatan aparatur satlinmas.

#### ❖ Hambatan :

a) Terbatasnya anggaran.

#### ❖ Solusi :

a) Tetap melaksanakan kegiatan pemberdayaan dengan memaksimalkan anggaran yang ada.

## C. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

### 1) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

#### a. Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

Target yang ingin dicapai dalam Rapat Koordinasi Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimka) adalah semua rekomendasi yang masuk dikecamatan 100 % harus diselesaikan. Kegiatan Rapat Koordinasi Forkopimka dilakukan apabila terdapat persoalan yang harus dibahas oleh lintas sektor se-Kecamatan Malili. Berikut adalah beberapa hal yang dibahas dalam rapat Forkopimka Tahun 2022 :

- a) Pertemuan dengan beberapa lintas sektor terkait peningkatan mutu dan pelayanan Kesehatan termasuk penanganan stunting di Kecamatan Malili
- b) Pertemuan dengan beberapa lintas sektor terkait peningkatan mutu pendidikan di Kecamatan Malili
- c) Menindaklanjuti permasalahan pelaksanaan shalat Idul Fitri

- d) Persiapan HUT Republik Indonesia ke 76
- e) Rapat Koordinasi Forkopimca dengan Bupati Luwu Timur.

❖ **Hambatan :**

- a) Sinergitas antara FORKOPIMKA, pemerintah desa/kelurahan dan unit kerja lingkup Kecamatan Malili belum maksimal.

❖ **Solusi:**

- a) Lebih meningkatkan koordinasi antara sesama unsur-unsur terkait.

**D. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**

- 1) Fasilitasi, rekomendasi dan koordianasi pembinaan dan pengawasan pemerintah daerah

- a. Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan

Target dalam sub kegiatan ini adalah jumlah kawasan perdesaan yang terpantau perencanaan dan pelaksanaan programnya dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di kawasan perdesaan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Sebelum dicairkan, APBDes diverifikasi oleh Tim Fasilitasi dan Evaluasi kecamatan lalu dibuatkan surat pengantar untuk dapat di teruskan dan diverifikasi kembali oleh Dinas PMD. Setiap Desa mengajukan Peraturan yang telah dibuat kepada Camat Malili untuk mendapatkan rekomendasi pencairan APBDes. Pencairan APBDes dilakukan dalam 2 (dua) tahap selama 1 (satu) tahun anggaran.

❖ **Hambatan :**

- a) Keterlambatan Informasi terkait aturan penyusunan APBDes.
- b) Peraturan Bupati terkait pagu indikatif terlambat ditetapkan.
- c) Belum adanya peningkatan kapasitas SDM di kecamatan terkait kegiatan perencanaan desa.

❖ **Solusi :**

- a) Melakukan konsultasi dan koordinasi yang lebih intensif dengan pihak terkait.
- b) Menggunakan estimasi anggaran tahun sebelumnya.
- c) Pengusulan kegiatan bimbingan teknis perencanaan APBDes kepada SKPD terkait.

**E. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**

1) Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

a. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

Target dalam sub kegiatan ini adalah kegiatan sinergi dengan kepolisian, TNI dan Instansi Vertikal untuk mewujudkan masyarakat aman dan tentram di wilayah kecamatan malili, kerjasama ini tidak hanya pada bidang keamanan namun juga bidang-bidang lain dalam mengawal program pemerintah

❖ **Hambatan :**

- a) Masih banyak pemilik ternak liar,
- b) kenakalan remaja

❖ **Solusi :**

d) Melakukan sosialisasi di masyarakat terkait perda hewan ternak

e) Melakukan pendekatan dengan remaja di masing2 desa

b. Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat

Target dalam sub kegiatan ini adalah melakukan pertemuan dalam upaya himbauan atau pencegahan pelanggaran ketentraman dan ketertiban yang dilaksanakan untuk menjalin informasi dalam upaya pencegahan pelanggaran dan norma norma ditengah masyarakat kecamatan malili. Kecamatan Malili melakukan pertemuan dengan tokoh-tokoh agama dan tokoh masyarakat.

❖ **Hambatan :**

a) Masih adanya pernikahan dibawah umur

❖ **Solusi :**

f) Melakukan sosialisasi di masyarakat terkait perda pernikahan dibawah umur

2. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

1. Koordinasi/Sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia

Target dalam sub kegiatan ini adalah koordinasi/sinergitas dengan polri dan/atau perangkat daerah bidang penegakan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini kecamatan malili melakukan pertemuan dengan polri, TNI, Satpol PP dalam rangka penegakan perda yang ada untuk menata dan mengatur tatanan sehingga terwujud kenyamanan dan keindahan di wilayah kecamatan malili

❖ **Hambatan :**

- a) Masih banyak warga yang membangun rumah tinggal tidak sesuai perda.

❖ **Solusi :**

- a) Melakukan sosialisasi terkait Perda

**Sasaran 2. Meningkatnya Capaian Kinerja dan Keuangan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan Malili**

Sasaran strategis ini merupakan salah satu upaya mencapai misi ke-4 sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2021-2026 yaitu "**Menciptakan Kepemerintahan dan Pelayanan Publik yang lebih baik**", dan tujuan "**Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan**". Sasaran ini didukung oleh Kantor Kecamatan Malili, kaitannya dengan Pelaksanaan Tata Pemerintahan dilingkup kecamatan.

Sebagai catatan untuk Nilai SAKIP sampai saat laporan ini disusun, Inspektorat Kabupaten Luwu Timur belum mengeluarkan Laporan Hasil Evaluasi LAKIP Tahun 2022, sehubungan hal tersebut maka pengukuran capaian Indikator Kinerja ini masih mengacu pada capaian tahun sebelumnya sebagai berikut:

**1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2021 dan tahun 2022**

Adapun perbandingan antara target dan realisasi pada tahun 2021 dan tahun 2022 terkait sasaran 2 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 3.4  
Perbandingan Antara Target dan Realisasi Tahun 2021 :**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2021	Target 2022	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Capaian 2021	Capaian 2022
1	Meningkatnya Capaian Kinerja dan Keuangan Penyelenggaraan urusan Pemerintah Kecamatan Malili	Nilai LAKIP	60.18	65.5	53,28 (CC)	-	88.53%	-

**Sumber : Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian**

**a. Analisis Capaian kinerja sasaran sebagai berikut :**

Berdasarkan tabel diatas, maka untuk tahun 2022 belum dapat dilihat persentase capaian kinerja sasaran 2 (dua) karena masih menunggu hasil evaluasi yang dilakukan inspektorat Kabupaten Luwu Timur. Sedangkan untuk tahun 2021 nilai LAKIP Kecamatan Malili adalah 53,28 (CC) dari target 60.18, ini berarti bahwa nilai evaluasi sakiip cukup dan tercapai, akan tetapi perlu ditingkatkan.

**2. Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Beberapa Tahun Terakhir**

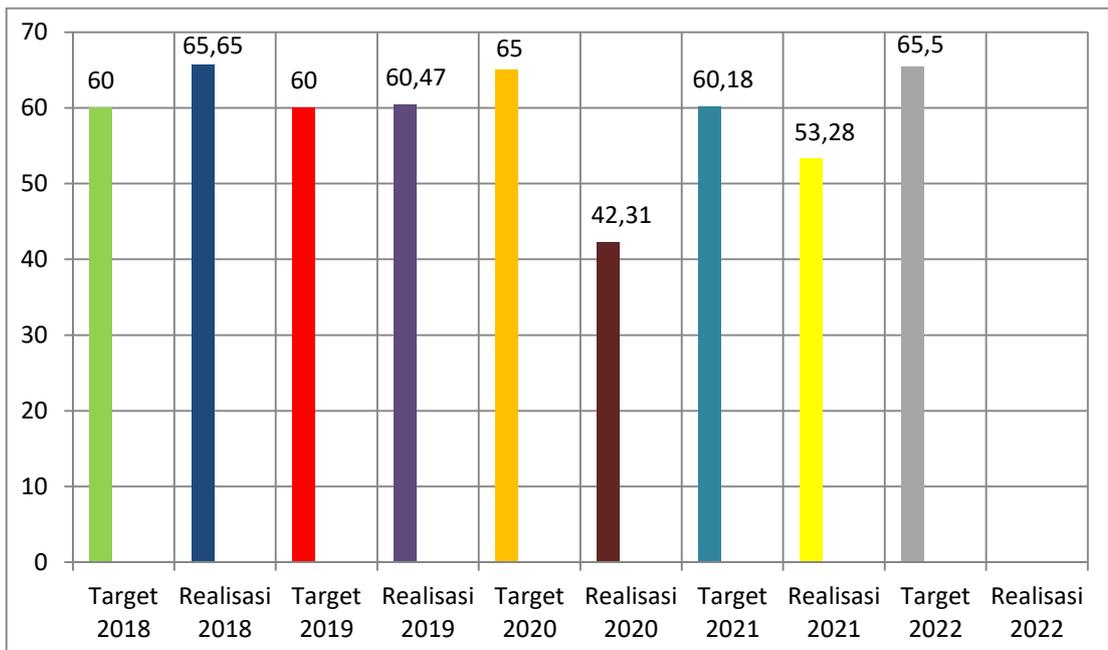
Adapun perbandingan antara target dan realisasi dengan tahun-tahun sebelumnya dapat digambarkan pada tabel berikut ini

**Tabel 3.5**

**Perbandingan Target dan Realisasi dengan Tahun-Tahun Sebelumnya**

NO	Indikator Kinerja	Tahun	Target	Realisasi	Capaian %	Predikat
1	Nilai Score LAKIP (n-1)	2018	60	65.65	109%	Baik
2		2019	60	60.47	107%	Baik
3		2020	65	42.31	65.9%	Kurang
4		2021	60.18	53.28	88.33%	Cukup
5		2022	65.5	-	-	-

**Sumber :Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian**



Berdasarkan grafik di atas, maka dapat dilihat perbandingan capaian kinerja tahun 2018 sampai tahun 2022 bahwa pada tahun 2018 Nilai Skor LAKIP yang diperoleh 65.65 dengan kategori B. pada tahun 2019 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya dengan memperoleh nilai 60.47 dengan kategori B. Dan pada tahun 2020 kembali mengalami penurunan dengan nilai 42,31 dengan Kategori C. Dan pada tahun 2021

mengalami peningkatan dengan nilai 53,28 dengan Kategori CC sehingga dapat disimpulkan, perolehan nilai LAKIP kantor Kecamatan Malili mengalami penurunan dan peningkatan pada setiap tahunnya.

**3. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun ini dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi**

**Tabel 3.6**  
**Perbandingan Capaian Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Terhadap Target Jangka Menengah ( Renstra 2021-2026)**

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	RENSTRA
			2021		
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja di Kecamatan Malili	Nilai Score LAKIP (n-1)	60.18	53.28 (CC)	72

**Sumber :Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian**

Berdasarkan capaian kinerja pada tahun 2021 yaitu Skor LAKIP 53.28 dengan kategori CC. Nilai SAKIP yang diraih Tahun 2021 ini menunjukkan tidak adanya pencapaian sesuai target yang ditentukan.

**4. Analisis penyebab keberhasilan dan kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan.**

Ada beberapa hal yang mempengaruhi kegagalan capaian indikator tersebut yaitu :

- a. Belum dilakukan revisi renstra yang disesuaikan dengan hasil review RPJMD Tahun 2021-2026.
- b. Lemahnya pemahaman bersama tentang proses dan mekanisme dalam konsistensi perencanaan dan penganggaran

- c. Kurangnya koordinasi dalam upaya mendapatkan target capaian kinerja

#### 5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

**Tabel 3.7**  
**Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya**

NO	Jabatan	Hasil Analisis Jabatan		Kondisi saat ini		
		Struktural	Pelaksana	Struktural	Pelaksana	
					PNS	Non PNS
1	Camat	1	-	1	-	-
2	Sekretaris Camat	1	-	1	-	-
3	Kasubag Perencanaan dan Kepegawaian	1	4	1	-	1
4	Kasubag Umum dan Keuangan	1	5	1	2	2
5	Kasi Pemerintahan Umum	1	6	1	-	-
6	Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa	1	7	1	1	-
7	Kasi Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	1	9	1	1	-
8	Kasi Pelayanan Umum	1	7	1	1	1
<b>JUMLAH</b>		<b>8</b>	<b>38</b>	<b>8</b>	<b>5</b>	<b>4</b>
<b>TOTAL</b>		<b>32</b>		<b>17</b>		

Sumber : Dokumen ANJAB dan ABK

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa jumlah dan syarat pemangku jabatan pelaksana pada Kantor Kecamatan Malili belum sesuai dengan hasil analisis jabatan Kecamatan Malili yang dibuat oleh Bagian Organisasi SETDA Kabupaten Luwu Timur karena sebagian jabatan pelaksana masih diisi oleh Non PNS (tenaga upah jasa).

#### 6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Adapun program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian sasaran 2 (dua) yaitu meningkatnya pelayanan publik di Kecamatan Malili adalah :

## **A. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah :**

### **1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**

#### **a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah**

Target dalam sub kegiatan ini adalah tersusunnya 2 (dua) dokumen perencanaan Perangkat Daerah, dalam 1 (satu) tahun, terdapat 2 (dua) dokumen perencanaan yang disusun oleh Kantor kecamatan Malili, diantaranya adalah Renja Pokok dan Renja Perubahan.

#### **❖ Hambatan :**

- a) Keterbatasan data dan informasi dari masing-masing sub bagian dan kepala seksi yang di butuhkan dalam penyusunan dokumen perencanaan sehingga seringkali penyusunan dokumen perencanaan mengalami keterlambatan.
- b) Kurangnya koordinasi dalam penyusunan dokumen perencanaan.

#### **❖ Solusi:**

- a) Lebih meningkatkan koordinasi antara sesama unsur-unsur terkait dalam hal ini masing-masing Seksi dan Sub Bagian.

#### **b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD**

Target dalam sub kegiatan ini adalah tersusunnya 2 (dua) dokumen RKA-SKPD, dalam 1 (satu) tahun, terdapat 2 (dua) dokumen RKA-SKPD yang disusun oleh Kantor kecamatan Malili, diantaranya adalah RKA-SKPD Pokok dan RKA-SKPD Perubahan.

#### **c. Koordinasi dan penyusunan dokumen DPA-SKPD**

Target dalam sub kegiatan ini adalah tersusunnya 2 (dua) dokumen DPA-SKPD, dalam 1 (satu) tahun, terdapat 2 (dua) dokumen DPA-SKPD yang disusun oleh

Kantor kecamatan Malili, diantaranya adalah DPA-SKPD Pokok dan DPA-SKPD Perubahan.

d. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

❖ **Hambatan/Kendala**

Dalam pencapaian program, terdapat beberapa hambatan atau kendala yang dihadapi yaitu :

- a) Keterlambatan pengumpulan data untuk bahan LAKIP dari Kepala Seksi.

❖ **Solusi**

Untuk menjawab permasalahan atau kendala yang dihadapi, maka telah dilakukan beberapa solusi yaitu :

- a) Menekankan kepada kepala seksi untuk segera menyiapkan bahan yang diperlukan dalam penyusunan LAKIP.

2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Target dalam sub kegiatan ini adalah terbayarkannya Gaji dan Tunjangan ASN di kantor kecamatan Malili sebanyak 22 orang. Tidak ditemukan hambatan dalam pelaksanaan sub kegiatan ini di kantor Kecamatan Malili.

b. Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

Target dalam subkegiatan ini adalah penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran kantor kecamatan malili. Tidak ditemukan hambatan dalam pelaksanaan sub kegiatan ini

3) Administrasi Barang Milik Daerah pada perangkat Daerah

a. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

Target dari sub kegiatan ini adalah barang yang disediakan untuk mendukung pelaksanaan kinerja di

kantor kecamatan Malili dilaksanakan dengan persentase 100%.

❖ **Hambatan/Kendala**

Dalam pencapaian sub kegiatan, terdapat beberapa hambatan atau kendala yang dihadapi yaitu :

- a) Pengurus barang belum maksimal dalam menyediakan sebagian kebutuhan kantor (ATK).
- b) Inventarisasi barang milik daerah masih belum maksimal.

❖ **Solusi**

Untuk menjawab permasalahan atau kendala yang dihadapi, maka telah dilakukan solusi yaitu :

- a) Tetap memaksimalkan anggaran yang tersedia dalam melaksanakan program/kegiatan.
- b) Melakukan inventarisasi kebutuhan barang milik daerah pada setiap ruangan, persediaan setiap triwulan.

4) Administrasi Kepegawaian perangkat Daerah

- a. Pendataan dan Pengolahan Admministrasi Kepegawaian

Target dari sub kegiatan ini adalah laporan data administrasi kepegawaian. Tidak di temukan masalah didalam pelaksanaan sub kegiatan ini.

- b. Bimbingan teknis implementasi Peraturan Perundang-undangan

❖ **Hambatan/Kendala**

Dalam pencapaian program, terdapat beberapa hambatan atau kendala yang dihadapi yaitu alokasi anggaran Bimbingan Teknis kurang

❖ **Hambatan/Kendala**

Akan memaksimalkan anggaran Bimtek

5) Administrasi Umum Perangkat Daerah

- a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor;
- b. Penyediaan peralatan dan Perlengkapan Kantor;
- c. Penyediaan bahan logistic kantor
- d. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan;
- e. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan;
- f. Fasilitasi kunjungan tamu;
- g. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD.

❖ **Hambatan/Kendala**

Dalam pencapaian program, terdapat beberapa hambatan atau kendala yang dihadapi yaitu :

- a) Melakukan inventarisasi kebutuhan barang dan ATK setiap ruangan, persediaan setiap triwulan.

❖ **Solusi**

Untuk menjawab permasalahan atau kendala yang dihadapi, maka telah dilakukan solusi yaitu :

- a) Tetap memaksimalkan anggaran yang tersedia dalam melaksanakan program/kegiatan.
- b) Melakukan inventarisasi kebutuhan barang dan ATK setiap ruangan, persediaan setiap triwulan.
- c) Memaksimalkan koordinasi dengan stakeholder.

- ❖ Adapun hal yang mempengaruhi keberhasilan capaian indikator tersebut yaitu koordinasi dan komunikasi yang baik antar pimpinan dan staf

6) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- a. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Target dari sub kegiatan ini adalah tersedianya kendaraan dinas di kantor kecamatan malili. Tidak di temukan masalah didalam pelaksanaan sub kegiatan ini.

- 7) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  - a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
  - b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
  - c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

- **Hambatan/Kendala**

Dalam pencapaian sub kegiatan, terdapat beberapa hambatan atau kendala yang dihadapi yaitu :

- a) Pengurus barang belum maksimal dalam menyediakan sebagian kebutuhan kantor (ATK).
- b) Belum adanya sinkronisasi antara kebutuhan dan pembagian anggaran keuangan.

- ❖ **Solusi**

Untuk menjawab permasalahan atau kendala yang dihadapi, maka telah dilakukan solusi yaitu :

- a) Tetap memaksimalkan anggaran yang tersedia dalam melaksanakan program/kegiatan.
  - b) Melakukan inventarisasi kebutuhan barang milik daerah pada setiap ruangan, persediaan setiap triwulan.
  - c) Melakukan sinkronisasi antara kebutuhan dengan perencanaan kegiatan.
- 2) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
    - a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.

- b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

❖ **Hambatan/Kendala**

Dalam pencapaian program, terdapat beberapa hambatan atau kendala yang dihadapi yaitu :

- a) Belum adanya sinkronisasi antara kebutuhan dan pembagian anggaran keuangan.

❖ **Solusi**

Untuk menjawab permasalahan atau kendala yang dihadapi, maka telah dilakukan solusi yaitu :

- a) Tetap memaksimalkan anggaran yang tersedia dalam melaksanakan program/kegiatan.
- b) Melakukan sinkronisasi antara kebutuhan dengan perencanaan kegiatan.

- ❖ Adapun hal yang mempengaruhi keberhasilan capaian indikator tersebut yaitu pada umumnya kegiatan yang apa pada program Penunjang Urusan Permerintah Daerah berjalan dengan baik.

### **3.2. Realisasi Anggaran**

Anggaran APBD untuk Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 adalah sebesar Rp.4.258.936.598,- Sedangkan Realisasi Anggaran Tahun 2022 sebesar Rp.4.090.724.683,- dengan capaian **96,05%**. Secara rinci alokasi anggaran tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.8  
Realisasi Anggaran Tahun 2022

NO	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET TRIWULAN I, II, III, IV  (BERDASARKAN ANGGARAN KAS)	REALISASI ANGGARAN S.D 31 Desember 2022	Capaian (%)
			(Rp.)	(%)
(1)	(2)	(5)	(6)	(7)
				(6/5*100)
01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KAB/KOTA</b>	<b>4,017,602,908</b>	<b>3,860,805,768</b>	<b>96,10</b>
	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>26,907,460</b>	<b>25,553,960</b>	<b>94,97</b>
	- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	13,522,000	13,168,660	97,39
	- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4,999,880	4,519,300	90,39
	- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4,999,800	4,752,600	95,06
	- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3,385,780	3,113,400	91,96
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>2,122,683,116</b>	<b>2,045,656,392</b>	<b>96,37</b>
	- Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN	2,089,938,426	2,013,473,116	96,34
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/	32,744,690	32,183,276	98,29

	Triwulanan/ Semesteran SKPD			
	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>19,349,920</b>	<b>19,275,081</b>	<b>99,61</b>
	- Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	19,349,920	19,275,081	99,61
	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>39,333,289</b>	<b>38,543,509</b>	<b>97,99</b>
	- Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12,383,289	12,338,509	99,64
	- Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	26,950,000	26,950,000	97,24
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>669,838,900</b>	<b>648,424,760</b>	<b>96,80</b>
	- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	13,658,600	13,105,700	95,95
	- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	41,200,000	36,129,500	87,69
	- Penyediaan Bahan Logistik Kantor	63,618,100	65,519,150	98,39
	- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	14,920,000	12,815,000	85,89
	- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	9,900,000	9,900,000	100,00
	- Fasilitas Kunjungan Tamu	136,175,000	123,963,000	91,03
	- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	390,367,200	389,920,410	99,89

	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>566,500,000</b>	<b>517,000,000</b>	<b>91,26</b>
	- Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	566,500,000	517,000,000	91,26
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>450,825,223</b>	<b>446,390,756</b>	<b>99,02</b>
	- Penyediaan Jasa Surat Menyurat	19,245,223	18,467,431	95,96
	- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	101,280,000	97,625,325	96,39
	- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	330,300,000	330,300,000	100,00
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>122,165,000</b>	<b>119,961,310</b>	<b>98,20</b>
	- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	8,365,000	6,340,310	75,80
	- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	25,800,000	25,770,000	99,98
	- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	88,000,000	87,851,000	99,83
	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>94,014,800</b>	<b>87,377,070</b>	<b>92,94</b>
	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit Kerja perangkat Daerah yang ada di</b>	<b>87,138,400</b>	<b>81,410,600</b>	<b>93,43</b>

	<b>Kecamatan</b>			
	- Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	87,138,400	81,410,600	93,43
	<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>	<b>6,876,400</b>	<b>5,966,470</b>	<b>86,77</b>
	- pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	6,876,400	5,966,470	86,77
	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>65,875,720</b>	<b>65,710,525</b>	<b>99,75</b>
	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	<b>24,999,680</b>	<b>24,915,000</b>	<b>99,66</b>
	- Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	24,999,680	24,915,000	99,66
	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	<b>40,876,040</b>	<b>40,795,525</b>	<b>99,80</b>
	- Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	40,876,040	40,795,525	99,80
	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>17,024,271</b>	<b>16,119,790</b>	<b>94,69</b>
	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban Umum</b>	<b>12,024,480</b>	<b>11,795,190</b>	<b>98,09</b>

	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	7,449,765	7,370,250	98,93
	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	4,574,715	4,424,940	96,73
	<b>Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah</b>	<b>4,999,791</b>	<b>4,324,600</b>	<b>86,50</b>
	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakkan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	4,999,791	4,324,600	86,50
	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>56,259,049</b>	<b>52,738,730</b>	<b>93,74</b>
	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	<b>56,259,049</b>	<b>52,738,730</b>	<b>93,74</b>
	- Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	56,259,049	52,738,730	93,74
	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>8,159,850</b>	<b>7,972,800</b>	<b>97,71</b>
	<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Daerah</b>	<b>8,159,850</b>	<b>7,972,800</b>	<b>97,71</b>

	- Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Pedesaan di Wilayah Kecamatan	8,159,850	7,972,800	97,71
<b>TOTAL BELANJA</b>		<b>4.258.936.598</b>	<b>4.090.724.683</b>	<b>96.05</b>

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

---

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Malili Tahun 2022 ini merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, kebijakan, program dan kegiatan. Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur telah menetapkan 2 (dua) sasaran yang didasarkan pada tujuan, sasaran strategis dan target kinerja yang telah ditetapkan baik pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026, serta Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Malili Tahun 2021-2026.

Secara keseluruhan persentase capaian dari 2 (dua) sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kecamatan Malili Tahun 2022 hanya 1 sasaran yang bisa digambarkan capaian kinerjanya yaitu sasaran 1 (satu) survei kepuasan masyarakat dengan realisasi baik 93.26 dari target 80. Sedangkan sasaran ke 2 (dua) yaitu Nilai LAKIP belum bisa digambarkan capaiannya disebabkan penilaian LAKIP untuk Tahun 2022 baru akan dilaksanakan pada triwulan I tahun 2023. Pada tahun 2022 Kecamatan Malili telah menggunakan Anggaran Belanja sebesar Rp. 4.090.724.683 dari pagu anggaran sebesar Rp. 4.258.936.598 atau setara dengan 96.05% dari anggaran indikatif yang direncanakan, hal tersebut menunjukkan bahwa perencanaan Kecamatan Malili telah optimal.

Pada tahun 2022 terdapat beberapa kendala dan hambatan yang dihadapi dalam upaya pencapaian sasaran Kecamatan Malili meliputi :

1. Keterbatasan data. Data dan informasi yang diperlukan dalam penyusunan LAKIP baik data internal maupun eksternal masih sangat terbatas.
2. Belum samanya pemahaman mengenai materi LAKIP bagi pelaksana kegiatan sehingga dalam penentuan Rencana Kinerja terutama penetapan indikator kinerja masing-masing kegiatan belum sesuai dengan defenisi yang diuraikan dalam Pedoman Penyusunan

LAKIP (Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 tentang Juknis PK, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas LKIP). Pada umumnya pelaksana kegiatan masih kesulitan dalam menentukan target indikator outcomes secara kuantitatif.

3. Pengembangan kelembagaan pada umumnya belum dilaksanakan secara optimal sehingga masyarakat yang ikut serta dalam pelaksanaan kegiatan hanya aktif pada masa-masa tertentu saja selama kegiatan itu berjalan (ada anggaran).

❖ Langkah Antisipatif :

1. Langkah-langkah antisipatif dalam upaya memecahkan masalah terutama lebih ditingkatkan koordinasi baik pada tingkat kabupaten maupun instansi terkait dan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan umum sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan.
2. Melakukan kajian-kajian perencanaan yang lebih akurat.
3. Mengintensifkan koordinasi internal program dan kegiatan.
4. Meningkatkan monitoring dan evaluasi terhadap perjanjian kinerja secara berjenjang.
5. Meningkatkan kapasitas dan kemampuan sumber daya manusia melalui bimtek/diklat.
6. Menyiapkan sarana dan prasarana yang memadai.
7. Memaksimalkan kinerja dan pelayanan dengan sumber daya manusia yang terbatas.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur ini, diharapkan dapat memberikan gambaran kinerja kepada pihak-pihak terkait.

Malili, Februari 2023

CAMAT MALILI

**NASIR,SP.M.Si**

NIP. 198111162010011015

**LAMPIRAN – LAMPIRAN**

- i. PERJANJIAN KINERJA
- ii. LAIN-LAIN YANG DIANGGAP PERLU